

PENGARUH NILAI MORAL ISLAM TERHADAP PERILAKU BIROKRASI PEMERINTAH

Cintasya Binar Sabrina¹, Talitha Salwa Adhyasta²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Madura,
Pamekasan, Indonesia

Email Korespondensi: ¹cintasyab.s@gmail.com , ²atalithasalwa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh nilai moral Islam terhadap perilaku birokrasi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih ditemukannya berbagai permasalahan dalam birokrasi seperti korupsi, kolusi, nepotisme, serta rendahnya kualitas pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai moral Islam memiliki peran penting sebagai pengendali internal dalam membentuk perilaku birokrasi yang berintegritas, profesional, dan bertanggung jawab. Implementasi nilai-nilai seperti shiddiq, amanah, fathonah, dan tabligh mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Selain itu, penerapan nilai moral Islam juga efektif dalam mencegah patologi birokrasi dan mendukung terciptanya good governance. Dengan demikian, integrasi nilai moral Islam dalam birokrasi pemerintah dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kata Kunci: Nilai moral Islam; birokrasi pemerintah; good governance; etika birokrasi; pelayanan publik.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Islamic moral values on the behavior of government bureaucracy in realizing good governance. The background of this study is based on the continued discovery of various problems in the bureaucracy such as corruption, collusion, nepotism, and the low quality of public services. The method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through literature studies. The results of the study indicate that Islamic moral values have an important role as an internal control in shaping bureaucratic behavior with integrity, professionalism, and responsibility. The implementation of values such as shiddiq, amanah, fathonah, and tabligh can improve the quality of decision-making and encourage transparency and accountability in public services. In addition, the application of Islamic moral values is also effective in preventing pathologies of justice and supporting the creation of good governance. Thus, the integration of Islamic moral values in government bureaucracy can be a solution in improving the quality of public services and public trust in the government.

Keywords: Islamic moral values; government bureaucracy; good governance; bureaucratic ethics; public service.

Pendahuluan

Nilai moral adalah prinsip atau standar yang digunakan untuk menentukan apa yang dianggap benar atau salah dalam tingkah laku dan keputusan yang diambil oleh seseorang atau sekelompok orang. Nilai moral secara universal adalah prinsip atau standar yang diakui oleh banyak orang di seluruh dunia sebagai dasar bagi tingkah laku yang baik dan

benar. Nilai-nilai moral universal ini tidak terikat pada suatu agama atau budaya tertentu, melainkan merupakan nilai-nilai yang diakui oleh banyak orang di seluruh dunia sebagai standar tingkah laku yang baik. Dalam kamus psikologi (Chaplin, 2006), disebutkan bahwa moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial, atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Ia berfungsi sebagai pedoman hidup, membentuk karakter, dan menjaga harmoni sosial. Nilai ini sering kali dikaitkan dengan hati nurani, etika, dan norma kebudayaan. Nilai moral bisa bervariasi dari satu individu ke individu lain, dan bisa juga berbeda antara satu kelompok atau masyarakat dengan kelompok atau masyarakat lain. Nilai moral bersifat kultural adalah prinsip atau standar yang hanya diakui oleh sebagian masyarakat saja, tergantung pada budaya dan agama yang dianut oleh masing-masing individu. Nilai-nilai moral bersifat kultural ini bisa berbeda-beda di setiap negara atau masyarakat, karena dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti agama, adat istiadat, dan budaya yang berlaku di masing-masing tempat.

Nilai-nilai moral seseorang dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain agama yang mengajarkan kejujuran, keadilan, dan pengampunan; tradisi atau kebiasaan masyarakat yang telah terbentuk selama bertahun-tahun; norma-norma sosial seperti toleransi, keadilan, dan kemanusiaan; pendidikan yang membantu memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip penting dalam kehidupan sosial; serta pengalaman pribadi dan pemahaman individu tentang dunia yang membentuk pandangan unik mereka tentang benar dan salah. Contoh nilai moral antara lain religiusitas, yang tercermin dari pengaruh agama seperti Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia; saling menghargai, yaitu kemampuan untuk menghormati orang lain dan perbedaan yang ada; serta kejujuran, yang dianggap penting karena membangun kepercayaan diri dan dihargai oleh masyarakat.

Birokrasi adalah suatu sistem organisasi yang didesain untuk menjalankan fungsi administrasi secara terstruktur melalui pembagian tugas, hierarki kewenangan, dan aturan formal. Ketika pemerintah atau legislatif membuat kebijakan, birokrasi bertugas menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi program, layanan, atau regulasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Birokrasi tidak hanya digunakan di pemerintahan tapi juga perusahaan besar, universitas, organisasi internasional, bahkan lembaga non-profit. Namun, dalam konteks negara modern, birokrasi memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi fondasi administrasi publik. Birokrasi menjalankan peran yang sangat kompleks. Secara umum, fungsinya yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, penegakan aturan, distribusi sumber daya, pengembangan data dan informasi, stabilitas sistem pemerintahan.

Tujuan keberadaan birokrasi dalam konteks pelayanan publik mencakup yaitu memberi pelayanan yang adil dan merata untuk seluruh warga, memastikan kepastian hukum dalam setiap keputusan administrasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara, mencegah penyimpangan kewenangan melalui aturan dan

pengawasan, mendukung pembangunan nasional melalui implementasi program pemerintah. Contoh lembaga yang berperan dalam birokrasi pemerintahan Indonesia di antara lainnya kementerian, pemerintah daerah, BPN, dinas dukcapil, BPJS kesehatan & ketenagakerjaan, dinas perizinan/OSS, sekolah negeri & RSUD, kantor desa/kelurahan. Pada akhirnya, kualitas birokrasi akan menentukan kualitas pelayanan publik, pembangunan nasional, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Oleh sebab itu, penguatan birokrasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat melalui partisipasi konstruktif dan budaya administratif yang sehat.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian. Menurut Heri Rahyubi, metode penelitian adalah sebuah model yang dapat digunakan dengan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai sebuah proses dalam pembelajaran tersebut dengan baik. Sedangkan menurut Prof. M.E Winarno, metode penelitian adalah sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan menggunakan teknik yang cermat dan sistematis. Pada dasarnya metode penelitian ini merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan berdasar pada ciri-ciri keilmuan rasional, sistematis, dan empiris.

Metode penelitian tidak hanya statistic pada apa yang digunakan, namun lebih kepada pemikiran dibalik penelitian, yaitu bagaimana peneliti benar-benar ingin mencari tahu, bagaimana membangun argument tentang ide dan konsep, dan apa bukti bahwa penulis dapat menemukan atau mendukung argument yang sudah ada. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penulis untuk penelitian kali ini adalah metode penelitian kualitatif, karena peneliti tidak perlu terjun langsung ke lapangan. Namun untuk lebih spesifiknya, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang menggambarkan suatu masalah dengan kata-kata serta dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan (Arikunto, 2010:207).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Nilai moral Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan perilaku birokrasi pemerintah, terutama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), berintegritas, dan melayani. Secara konseptual, nilai moral Islam bertindak sebagai internal control (kendali internal) yang melengkapi *external control* (seperti UU ASN atau peraturan disiplin). Berikut adalah analisis poin-poin pengaruh utamanya:

Transformasi Paradigma: Kerja Sebagai Ibadah

Transformasi paradigma adalah perubahan mendasar pada cara berpikir, perspektif, atau asumsi dasar seseorang/kelompok dalam memandang suatu hal, yang menggantikan

paradigma lama. Revolusi ilmiah adalah contoh sempurna dari pergeseran paradigma seperti yang dijelaskan oleh Thomas Kuhn dalam "Struktur Revolusi Ilmiah" (1962). Kuhn berpendapat bahwa sains berkembang bukan melalui akumulasi pengetahuan baru secara linier, tetapi melalui revolusi periodik, yang juga disebut "pergeseran paradigma."

Bekerja adalah ibadah dalam Islam jika diniatkan ikhlas karena Allah untuk mencari rezeki halal, bertanggung jawab, dan profesional, sehingga mengubah lelah menjadi pahala. Bukan hanya aktivitas ekonomi, tapi juga kew commandments agama untuk menjaga martabat manusia, menafkahi keluarga, dan memberi manfaat sosial.

Pekerjaan bukan hanya sarana mencari nafkah, tetapi juga panggilan rohani yang mencerminkan kasih Allah dan keadilan sosial. Setiap bentuk pekerjaan, baik di sektor bisnis, pendidikan, pemerintahan, maupun pelayanan sosial, dapat dipersembahkan sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan, asalkan dilakukan dengan niat untuk memuliakan-Nya dan melayani sesama.

Implementasi Nilai Sifat Kenabian dalam Birokrasi

Implementasi nilai-nilai sifat kenabian (*Prophetic Leadership*) dalam birokrasi merupakan salah satu pendekatan etika Islam untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih, dan berintegritas. Pelaksanaan dan birokrasi di Indonesia perlu dikaitkan dengan peran pentingnya ajaran Islam di kalangan para birokrat. Konsep ini berfokus pada transformasi perilaku aparatur negara agar tidak sekadar profesional secara teknis, tetapi juga memiliki karakter moral yang kuat. Dengan etika Islam membuat para birokrat paham agama yang akan membimbing mana yang benar dan mana yang salah. Maka membentuk etika birokrat yang Istami perlu sifat dan karakter Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits.

Berikut adalah implementasi empat sifat kenabian dalam birokrasi:

- a. **Shiddiq (Jujur dan Integritas).** Birokrat wajib memiliki integritas tinggi, berpegang teguh pada kebenaran, dan tidak menyalahgunakan wewenang (anti-KKN). Contoh dari implementasi sifat tersebut yaitu kejujuran dalam pelaporan kinerja dan kekayaan, tidak menerima suap, serta kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dalam pelayanan publik.
- b. **Amanah (Terpercaya dan Bertanggung Jawab).** Menganggap jabatan sebagai titipan Allah dan masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sebagai sarana mencari keuntungan pribadi. Contoh dari implementasi sifat tersebut yaitu transparansi dalam pengelolaan anggaran, disiplin waktu kerja, dan profesional dalam menyelesaikan tugas-tugas pelayanan.
- c. **Fathonah (Cerdas dan Profesional).** Memiliki kompetensi, keahlian, dan kearifan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan. Contoh dari implementasi sifat tersebut yaitu birokrasi yang berkinerja tinggi, inovatif dalam pelayanan publik, efektif, dan efisien.
- d. **Tabligh (Komunikatif dan Transparan)** Keterbukaan informasi dan kemampuan untuk menyampaikan kebijakan dengan jelas kepada masyarakat. Contoh dari implementasi sifat tersebut yaitu sosialisasi prosedur pelayanan secara terbuka, menerima kritik/saran, dan akuntabilitas melalui sistem pelaporan yang transparan.

Pengaruh terhadap Pengambilan Keputusan.

Nilai-nilai yang diajarkan dalam agama sering kali membentuk sikap dan tindakan seseorang ketika menghadapi dilema etika. Dalam proses pengambilan keputusan etis, individu yang memiliki tingkat religiusitas tinggi cenderung lebih berhati-hati dan berusaha untuk bertindak sesuai dengan ajaran agamanya, menjauhi tindakan yang dianggap tidak etis atau merugikan orang lain. Secara keseluruhan, pengaruh agama dalam pengambilan keputusan etis tidak hanya terlihat dalam konteks pribadi tetapi juga dalam lingkungan profesional, di mana nilai-nilai etika menjadi pedoman penting bagi individu dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai religius dalam pendidikan dan pelatihan dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran etis di berbagai bidang kehidupan.

Dalam pengambilan keputusan, musyawarah dan keadilan sangat penting, karena memungkinkan terciptanya kebijakan publik yang inklusif dan demokratis. Selain itu, perspektif Islam tentang hukum menekankan perlindungan hak-hak individu dan keadilan sosial, sementara dalam bidang ekonomi, ajaran Al-Qur'an dan Hadits menganjurkan distribusi kekayaan yang adil dan penghapusan riba. Di bidang pendidikan, nilai-nilai Islam mengintegrasikan pengetahuan duniawi dan spiritual untuk membentuk generasi muda yang berbudi luhur, sedangkan di bidang teknologi, ajaran Islam menawarkan bimbingan etis untuk memanfaatkan kemajuan teknologi demi kemajuan umat manusia. Studi ini menyimpulkan bahwa Al-Qur'an dan Hadits tidak hanya relevan tetapi juga memberikan solusi praktis untuk mengatasi tantangan modern di berbagai sektor kehidupan.

Pencegahan Patologi Birokrasi

Perjalanan birokrasi di Indonesia berkaitan erat dengan budaya bangsa dan dipengaruhi oleh permasalahan budaya yang ada. Budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang sulit diubah karena berkaitan erat dengan aspek moralitas, hal tersebut menjadi awal munculnya gejala dari patologi birokrasi. Budaya pungli, sogok menyogok, lambatnya pelayanan, prosedur yang berbelit-belit, korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah menjadi kebiasaan bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya patologi birokrasi yaitu dengan mengubah dan posisi peran birokrasi yang selama ini dilaksanakan. Selain itu dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dapat mencegah patologi birokrasi terutama dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk menciptakan birokrasi yang efisien.

Patologi birokrasi, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta inefisiensi dalam pelayanan publik, dapat diatasi melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan supremasi hukum. Diskusi menunjukkan bahwa reformasi birokrasi perlu mengatasi perubahan pola pikir dan nilai-nilai dalam organisasi, sekaligus memanfaatkan teknologi informasi untuk membuat pekerjaan birokrasi lebih efisien. Kesimpulannya, penerapan

tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dapat mencegah patologi birokrasi dan menciptakan birokrasi yang efisien, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa nilai moral Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku birokrasi pemerintah. Nilai-nilai tersebut berperan sebagai landasan etika yang membentuk integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme aparatur negara. Implementasi sifat kenabian seperti shiddiq, amanah, fathonah, dan tabligh terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi.

Selain itu, penerapan nilai moral Islam juga berkontribusi dalam memperbaiki proses pengambilan keputusan yang lebih etis dan adil, serta menjadi upaya preventif dalam mengatasi patologi birokrasi seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, integrasi nilai moral Islam dalam sistem birokrasi tidak hanya memberikan kontribusi secara teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan penelitian ini, khususnya kepada dosen pembimbing, pihak Program Studi Administrasi Publik Universitas Madura, serta rekan-rekan yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik birokrasi pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.
- Flick, Uwe. 2018. *An Introduction to Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Hamka. 2016. *Keadilan Sosial dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Karim, Adiwarmanto A. 2015. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maftuhin, Ahmad. 2017. "Filantropi Islam dan Keadilan Sosial." *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(1), 80–95.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, dan Saldaña, Johnny. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: Sage Publications.

NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: www.omahnurverse.com

Vol. 01. No. 01. 05-2026. hlm. 294 – 300.

Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rahman, Fazlur. 2018. *Islam dan Modernitas: Transformasi Intelektual*. Bandung: Pustaka.

Rahman, M. 2020. “Konsep Keadilan dalam Islam dan Implementasinya.” *Jurnal Pemikiran Islam*, 12(1), 40–55.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryadi. 2023. “Kebijakan Publik di Negara Muslim dan Tantangan Keadilan Sosial.” *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 105–120.

Wahidin, La Ode, dkk. 2025. “Dimensi Keadilan Sosial dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Studi Islam*, 18(1), 20–35.

Buku

Dian Ibung. (2007). *Mengembangkan Nilai Moral pada Anak*. Elex Media.

Jurnal

Manafe, F., & Mudak, S. (2025). Workshop: Pekerjaan Sebagai Ibadah. *Jurnal Teknologi dan Pendidikan Kristiani*, 10(9)

Hidayat, T., & Suryana, Y. (2020). Implementation of Islamic work ethics in youth organizations. *International Journal of Islamic Studies*, 5(1), 23–34. <https://doi.org/10.5678/ijis.v5i1.234>